

# PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL

*by* Firman, Firman

---

**Submission date:** 27-May-2023 05:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2103039960

**File name:** PENDIDIKAN\_BERWAWASAN\_MULTIKULTURAL\_-\_FIRMAN.pdf (125.8K)

**Word count:** 3041

**Character count:** 21220

## PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL

Dr. Firman S, M.Pd.<sup>1</sup>

### Abstrak

<sup>14</sup> Pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang terus-menerus. Tiga hal tersebut adalah pengajar, peserta didik dan realitas dunia. Multikulturalisme adalah sebagai ideologi yang menghendaki <sup>12</sup>nya pemahaman akan realitas kehidupan yang menghadirkan persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern yang bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan <sup>1</sup>mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks. multikulturalisme adalah mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kelompok. Sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya ekspresi secara bebas tentang berbagai langgam, nilai, dan keyakinan hidup. Peserta didik perlu dilibatkan dalam proses yang menunjukkan kepada mereka diversivitas etnis dan budaya.

**Kata kunci** : Pendidikan, Multikulturalisme

Multikulturalisme digambarkan sebagai sebuah mosaik <sup>1</sup> sehingga masyarakat dilihat sebagai sebuah kesatuan hidup manusia yang mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut, yang akarnya adalah kebudayaan yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>)

Sebagai suatu pandangan dunia (*world view*) yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007)

Bangsa Indonesia sangat dikenal sebagai masyarakat yang majemuk (plural), meliputi beragam suku, agama, ras, dan antargolongan. Bila kenyataan itu dikembangkan melalui pendidikan yang berwawasan multikultural, modal pluralitas bangsa ini pada dasarnya dapat menghantarkan bangsa Indonesia menuju arah kemajuan.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat <sup>1</sup> dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana tiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut

<sup>1</sup> Dosen Lektor Kepala pada STKIP PGRI Jombang

<sup>1</sup> terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

<sup>5</sup> Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta <sup>5</sup> mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Namun demikian keanekaragaman serta modal sosial ini belum menjadi faktor nilai tambah dalam kohesi sosial. Pluralitas malah menampilkan eksek negatif dengan munculnya berbagai macam konflik. Hal itu disebabkan karena munculnya sikap saling mencurigai dan fanatisme yang sangat berlebihan atas keunggulan kelompok atau golongannya. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari konflik yang terjadi itu. Padahal, di saat kondisi negara yang tak henti diterpa masalah yang berasal dari dalam dan luar negeri, disertai ancaman bencana alam yang mungkin akan terjadi kembali, kita memerlukan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara ini.

Pendidikan dianggap sebagai sebuah titik tolak (*turning-point*) yang sangat jitu dalam menumbuhkan kesadaran akan sikap toleran dan harga-menghargai terhadap kebudayaan atau identitas yang lain. Ini berarti pula bahwa pendidikan merupakan media strategis untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dalam masyarakat yang majemuk. Yaitu kesadaran untuk saling membangun kebersamaan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Multikulturalisme Sebagai Proses Pembudayaan**

Pendidikan merupakan gejala yang universal, karena pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Driyakara memandang intisari atau *eidos* pendidikan adalah untuk membudayakan manusia, pegangkatan manusia muda ketaraf insani, dan itulah yang menjelma dalam perbuatan mendidik yang jumlah dan macamnya tidak terhitung (Driyakara 1980). Tujuannya menurut Hutchin (1952), *adalah to improve man as man*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebagai proses humanisasi, atau yang dalam kosa kata bahasa kita sering disebut pemanusiaan. Dengan demikian "humanisasi", yaitu media dan proses untuk membimbing manusia muda menjadi dewasa, dan menjadi lebih manusiawi (*humanior*). Pendidikan adalah sebuah garapan kultural yang diorientasikan untuk menggapai cita-cita kemanusiaan.

Masalah multikulturalisme dalam pendidikan, menurut Ramly (2005) perlu mencermati kembali kaitan penting antara pendidikan dan kebudayaan sebagai embrio wacana pendidikan multikultural. Sebab, dalam praktik pendidikan nasional kaitan ini seringkali ditanggalkan. Fenomena kapilatisasi pendidikan, yang berusaha keras menjadikan dunia pendidikan sebagai ladang penumpukan materi adalah sebuah realitas yang membalikkan fungsi dan cita-cita pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai fenomena kultural dalam usaha memanusiakan manusia. Pendidikan hanya dijadikan alat kepentingan modal para kapitalis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan idiom pendidikan.

Ini adalah tantangan serius yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di tengah persaingan global. Kapitalisme global ternyata telah menghinggapi dunia pendidikan nasional. Kita perlu mengaitkan kembali hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan untuk mengembalikan ruh pendidikan pada cita idealnya. Bahwa pendidikan adalah wahana kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semua rakyat mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan nasional. Bila tidak dikaitkan seperti itu, maka praktik pendidikan akan sering disalahgunakan sebagai jalan untuk mencari keuntungan finansial semata, seperti yang telah terjadi dalam beberapa praktik pendidikan nasional.

Dalam sejarah pemikiran pendidikan Indonesia, kita telah mengenal seorang pendiri Taman Siswa yang ternyata telah jauh-jauh hari sudah mengajarkan tentang apa yang kini dikenal dengan pendidikan multikultural.

Ki Hajar Dewantara, dalam karyanya tentang kebudayaan (1967: 27), mengartikan kebudayaan atau kultur sebagai “buah dari keadaban manusia.” Secara etimologis, kata “kultur” berasal dari bahasa latin yang berarti “mengusahakan” untuk mendapat kemajuan hidup. Sedangkan menurut keadaannya, Ki Hajar (hlm. 28) membagi tiga macam kultur, yakni: (1) yang berkenaan tentang *hidup-kebatinannya* manusia, yaitu yang menimbulkan tertib-damai hidupnya bermasyarakat dengan adat istiadatnya yang halus dan indah; (2) yang berkenaan tentang *angan-angannya* manusia yang dapat menimbulkan keluhuran bahasa, kesusasteraan, dan pendidikan; (3) yang menyangkut *kepandaiannya* manusia, yang mampu menimbulkan macam-macam kepandaian pada diri manusia.

Melalui penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan itu sangat terkait dengan pendidikan, dan demikian pula sebaliknya. Jadi, pendidikan adalah hasil kebudayaan sebuah bangsa yang memiliki “angan-angan”, dalam istilah Ki Hajar, dalam upaya mencapai keluruhan hidup. Pendidikan adalah “produk” keadaban sebuah bangsa dalam memahami realitas kehidupannya yang sangat kompleks. Dengan kata lain, pendidikan perlu berwawasan multikultur karena menyangkut angan-angan kebersamaan, tanpa adanya perbedaan untuk mencapai keluruhan hidup bersama yang dimaksud.

Dalam pandangan tradisional, pendidikan dipandang sebagai kegiatan yang bertujuan atau sebagai jalan menuju pencapaian tujuan yang berada di luar proses pendidikan itu sendiri. Misalnya, pandangan Aristoteles yang melihat pendidikan sebagai sarana untuk membantu dalam pencapaian kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik, dan keadaan yang final. Artinya, di sini dipahami bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan, dengan pengandaian bahwa prosesnya terpisah.

Namun bagi Leo Tolstoy, pendidikan tidak mempunyai sasaran utama di luar pendidikan itu sendiri. Justru tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah berasal dari prosesnya sendiri, yaitu proses bagaimana “memahami” realitas yang ada. Dengan demikian, pendidikan sangat terkait sekali dengan kebudayaan. Artinya, konsep ini merangkum seluruh nilai dalam budaya masyarakat yang masih eksis. (lihat Archambault: 2001, hlm. 491). Dari paparan ini terlihat tidak disangsikan lagi bahwa kaitan antara pendidikan dan kebudayaan adalah sangat mutlak. Pendidikan adalah “proses”

(kebudayaan) manusia untuk mengembangkan kualitas dirinya menuju arah yang lebih baik.

### Multikulturalisme dalam Pendidikan

<sup>2</sup> Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu (*integrate*) tanpa mempedulikan keragaman budaya yang dimilikinya. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses “hidridisasi” yang meminta setiap orang/pihak untuk tidak menonjolkan perbedaan di masing-masing budayanya. Tidak pula ada semacam pemaksaan untuk harus menjadi satu budaya. Misalkan, tidak boleh ada kecenderungan untuk menjadikan budaya rendah (*low culture*) harus mengikuti budaya tinggi (*high culture*), atau budaya pribumi menghegemoni budaya pendatang, demikian pula sebaliknya. Semua budaya diakui dan diberikan ruang untuk saling berkembang secara berimbang.

Secara historis, pendidikan multikultural berawal dari kian maraknya gerakan-gerakan protes dari beberapa kelompok tertindas. Pendidikan multikultural lahir sekitar 40 tahun lalu, ketika Perang Dunia II telah berakhir disusul dengan lahirnya banyak Negara yang mulai merdeka dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Lahirnya pendidikan multikultural sangat terkait dengan konteks historis poskolonialisme yang pada saat itu sedang mengemuka. Sebab, di negara-negara bekas jajahan telah muncul gerakan poskolonial yang berhasil membuka aib praktik-praktik kolonial yang membedakan harkat dan martabat manusia (Tilaar, 2003: 164). Sehingga, munculnya gerakan-gerakan protes itu bermaksud ingin membangun kesetaraan dalam partisipasi masyarakat. Ada pengakuan identitas antarkebudayaan. Di sinilah tercakup makna pendidikan multikultural.

Gerakan semacam ini juga terjadi pada gerakan feminisme. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970 gerakan hak-hak perempuan telah berpartisipasi dalam mendorong upaya reformasi pendidikan. Mereka memprotes ketidakseimbangan hak-hak pendidikan yang diperoleh kaum perempuan, dan mereka juga memprotes ketidaksesuaian jumlah administratif perempuan yang sama kecilnya dengan jumlah guru perempuan (Banks, 1989).

Konsep dasar pendidikan multikultural mengandung pesan kultural dan kemanusiaan, pada tingkatan lokal maupun global. Berikut ini adalah nilai-nilai inti dan tujuan yang ada dalam konsep pendidikan multikultural. Menurut C.I. Bennett, seperti dikutip H.A.R. Tilaar (2003: 171-172) ada empat nilai inti dan enam macam tujuan dari pendidikan multikultural. Empat nilai-nilai inti (*core values*) yang terkandung dalam pendidikan multikultural adalah: (1) apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat; (2) pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia (HAM); (3) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia; (4) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Sedangkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pendidikan multikultural adalah: (1) mengembangkan perspektif sejarah (*ethnohistoritas*) yang beragam dari masyarakat;



(2) memperkuat kesadaran budaya yang hidup dalam masyarakat; (3) memperkuat kompetensi intercultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat; (4) membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka; (5) mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi; dan (6) mengembangkan keterampilan aksi sosial.

Kategorisasi atas konsep dasar pendidikan multikultural yang telah dibuat oleh C.I. Bennett cukup menarik karena memuat rangkaian nilai dan tujuan pendidikan multikultural yang sangat komprehensif. Pendidikan multikultural sanggup menggiring setiap orang untuk bersedia mengakui budaya dan hak asasi orang lain. Pendidikan yang berwawasan multikultur ternyata bias dipakai sebagai “pisau analisis” (*tool of analysis*) untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap aksi sosial-kemanusiaan, tidak hanya terhadap diri manusia, tetapi juga lingkungan dan alam.

Usaha keras untuk menerapkan multikulturalisme dalam pendidikan sebenarnya telah digemakan oleh seorang kritikus pendidikan ternama, yaitu Paulo Freire. Membangun kesetaraan atau egalitarianism dalam proses pendidikan yang humanis (manusiawi) adalah cermin dari sikap multikultural. Dalam bukunya, *Pendidikan Kaum Tertindas* (1991:49-52), Freire menegaskan pola pendidikan yang selama ini berkembang bahwa hubungan antara guru dan murid digerakkan melalui model pembelajaran “watak bercerita” (*narrative*); seorang subyek yang bercerita (guru) dan obyek-obyek yang patuh dan mendengarkan (murid-murid). Tugas guru yang menceritakan realitas-realitas, seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bergerak, statis, terpisah satu sama lain, dan dapat diramalkan. Akhirnya, guru hanya “mengisi” para murid dengan bahan-bahan yang dituturkan, padahal itu terlepas dari realitas dan terlepas pula dari totalitas. Pendidikan diibaratkan sebuah kegiatan “menabung.”

Freire sebenarnya ingin membangun pendidikan yang partisipatoris dan demokratis. Posisi guru dan murid sama-sama berimbang. Pendidikan tidak boleh dimonopoli oleh pihak/golongan tertentu. Model pendidikan gaya menabung di atas tidaklah mengindahkan semangat demokratis, karena murid dipaksa hanya untuk menerima keadaan yang telah dimonopoli oleh si guru. Sedangkan pendidikan multikultural bertujuan ingin menjadikan pendidikan sebagai sebuah proses kegiatan kebersamaan dan keterbukaan dalam kehidupan masyarakat yang bersedia untuk saling memahami.

### **Pluralitas dan Kemajuan Bangsa**

Sebenarnya, dapat kita katakan bahwa tujuan multikulturalisme adalah sama dengan tujuan yang ingin diraih dalam proses demokarsi. Intinya, yang ingin dibangun adalah sikap keterbukaan, atau toleransi dalam menerima pemahaman dan keberadaan identitas kebudayaan lain.

Dalam pendidikan multikultural terjadi dialog antarmasing-masing individu peserta didik. Dalam proses individuasi, di mana “Aku” (*self*) berdialog dengan “yang lain” (*the other*) dan “dunia sekitar” maka Aku akan memberikan makna kepada dunianya. Dengan demikian, di dalam proses individuasi tersebut, Aku mentransformasikan diriku, demikian halnya “yang lain” dan dunia sekitarnya. Menurut H.A.R. Tilaar (2002: 492), ada dua hal

yang perlu diperhatikan dalam proses individuasi tersebut, yaitu persoalan partisipasi dan wadah kebudayaan proksimitas.

Maksudnya, partisipasi dalam pendidikan sangatlah penting. Masih menurut H.A.R. Tilaar, partisipasi bukanlah sekedar persoalan hidup di dalam, dan mengambil bagian dalam proses bermasyarakat yang berbudaya, tetapi juga berfungsi untuk mengubah kehidupan bersama dan kebudayaan itu. Dengan dibukanya peluang partisipasi, maka setiap orang dapat diterima dalam kebudayaan tertentu. Proses pendidikan bukan sekedar reproduksi budaya, tapi juga sekaligus mengubah kebudayaan kepada tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik. Sedangkan wadah kebudayaan proksimitasnya adalah perkembangan partisipasi yang terus berkembang dari lingkungan lokal menjadi lingkungan nasional, bahkan menjadi lingkungan global (Tilaar, 2002: 493).

Partisipasi sosial adalah inheren dengan perubahan sosial. Inilah pentingnya pendidikan multikultural. Di zaman globalisasi sekarang ini, eksistensi hidup manusia yang tergerus oleh ganasnya modernitas dan kapitalisme global memerlukan pemecahan dari pendidikan yang memberikan arah yang tepat bagi kehidupan yang dinamis dan damai. H.A.R. Tilaar menangkap adanya fenomena “divergen-disintegratif” yang semakin jelas setelah runtuhnya rezim Orde Baru, bersamaan dengan makin masifnya praktik-praktik kapitalisme neoliberal, salah satu ciri terkuat dari globalisasi (*Kompas*, 9/11/2004).

Fenomena divergen-disintegratif ini adalah tantangan paling nyata yang sedang kita hadapi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berbagai macam konflik sosial dan politik pernah mengemuka, menyebabkan masyarakat kita terpecah-pecah akibat kepentingan golongan yang berdasarkan SARA. Sepertinya, masyarakat kita sangat mudah sekali disulut oleh konflik. Untuk menyelesaikan problem konflik dalam waktu panjang, peran pendidikan sangat diperlukan.

Musa Asy'ari, misalnya, dalam tulisannya berjudul *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa* (*Kompas*, 3/9/2004), mengemukakan konsep pendidikan multikultural sebagai “proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.” Dengan demikian, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif.

Didasarkan atas kenyataan bahwa masyarakat kita sangatlah majemuk, maka komposisi atau kurikulum pendidikan harus diisi dengan muatan-muatan pengetahuan yang mengenalkan tentang ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga setiap orang/masyarakat perlu bersikap toleran dalam mengakui eksistensinya dan identitas kebudayaannya masing-masing. Keterbukaan sangat penting. Dengan adanya keterbukaan (toleransi), maka terbentanglelah kebersamaan untuk sama-sama membangun bangsa dan negara. Pada akhirnya, bila cita-cita ini bias tercapai maka kemajuan bangsa bukanlah isapan jempol.

Pluralitas bangsa adalah modal besar yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Memang, sebagai bangsa yang sangat besar, potensi konflik selalu ada. Namun, pluralitas bangsa yang mampu diintegrasikan dengan wawasan multikultural justru akan

mengarahkan pada proses membangun negara dengan penuh kebersamaan. Dengan catatan, sikap saling curiga-mencurigai (*prejudices*) harus dihindari. Posisi ‘Aku’ dengan “yang lain” adalah setara dan berimbang, sehingga keduanya dapat berbuat untuk dunianya (negara dan bangsa). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, tanpa membeda-bedakan identitas dan kebudayaan, adalah sebuah keniscayaan yang bias kita pelajari melalui penerapan pendidikan multikultural.

### Perlunya Reaktualisasi

Mengingat pentingnya pendidikan multikultural sebagai terapi sosial untuk mengatasi krisis dan konflik bangsa, maka sudah semestinya arahan konsep ini direaktualisasikan dalam langkah praktis nyata. Artinya, pendidikan kultural tidak hanya menjadi bahan perbincangan belaka (teoritis), tapi perlu dipraktikkan secara massif dalam kehidupan masyarakat kita.

<sup>13</sup> Perbincangan mengenai multikulturalisme pernah mengemuka dalam acara Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3 yang mengambil tema “Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika” di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada 16-19 Juli 2002. Pada sesi panel diskusi “pendidikan Multikultural” dihasilkan lima langkah reaktualisasi yang harus dikembangkan dalam pendidikan multikultural. <sup>6</sup> *Pertama*, istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif, yaitu dengan jalan menggambarkan isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural.

*Kedua*, konsep pendidikan multikultural perlu diwujudkan dalam bentuk kurikulum, yang mencakup soal rumusan strategis, mata pelajaran, dan metode penyampaian. *Ketiga*, perlu dipetakan segala persoalan dan kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan multikulturalisme, seperti soal konflik-konflik akibat kepentingan golongan. *Keempat*, multikulturalisme dapat dilihat sebagai basisi kewarganegaraan, sehingga hal ini perlu disosialisasikan secara sistematis. *Kelima*, melakukan studi komparatif dengan Negara-negara lain yang mempunyai kebijakan multikulturalisme.

Perihal poin yang kelima diatas, Tony Mitchener (pejabat Kedutaan Australia di Jakarta untuk bidang Pendidikan, Sains, dan Pelatihan) memberikan contoh penerapan (praksis) pendidikan multikultural di negaranya, yaitu bahwa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Australia sudah diperkenalkan berbagai jenis masyarakat dan kebudayaan di berbagai belahan bumi. Para siswa tidak hanya mendapatkan materi multikulturalisme dari buku-buku semata, tetapi juga melalui internet (*Kompas*, 8/9/2004).

Kiranya, kalangan pendidik Indonesia perlu mempelajari kebijakan multikulturalisme itu sebagai bahan studi komparatif dalam proses pengembangan wacana pendidikan multikultural di Tanah Air. Penggunaan media teknologi, salah satunya adalah internet sangat membantu dalam setiap proses pendidikan.



Sementara itu, H.A.R. Tilaar melontarkan dua permasalahan pokok perihal reaktualisasi pendidikan multikultural (2003: 170). *Pertama*, pendidikan multikultural adalah sebuah proses. Artinya, pengembangan ke depannya perlu dibuat rumusan, refleksi, dan tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan konsep-konsep yang utama mengenai pendidikan dan hak asasi manusia. *Kedua*, pendidikan multikultural memerlukan pendekatan yang lintas-disiplin (*border crossing*) untuk mempertajam konsep pendidikan yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

Reaktualisasi itu perlu didukung oleh budaya demokrasi yang telah mengakar dalam diri masyarakat kita. Sebab, tanpa adanya alam demokrasi yang sehat adalah mustahil untuk menerapkan dan mengembangkan konsep pendidikan multikultural ini. Secara historis, munculnya pendidikan multikultural ditandai oleh bangkitnya semangat demokrasi yang menyeruak dalam berbagai negara di belahan muka bumi. Tentu saja, demokrasi yang diharapkan adalah keterbukaan dan pengakuan yang utuh oleh setiap pihak dalam memahami keadaan yang mesti diterima. Karena biasanya atas nama demokrasi, justru menginjak-injak demokrasi itu sendiri. Ini jelas berbahaya.

Pendidikan multikultural masih memerlukan pengayaan intelektual di sana-sini, sebab wacana ini memang menjadi bahan perbincangan yang masih jarang. Di Indonesia, sangat sedikit pakar pendidikan yang berbicara tentang tema ini. Kita sangat membutuhkan perangkat analisis dan metodologis pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi social-budaya masyarakat kita. Sehingga, pendidikan multikultural benar-benar mejadi senjata yang sangat ampuh untuk mengatasi problem konflik bangsa yang sering menganga.

#### Daftar Pustaka

- Archambault, Reginald D. 2003. "Pendidikan adalah Kebudayaan: Renungan Leo Tolstoy" dalam Paulo Freire dkk, *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*, terj. Omi Intan Naomi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Azra, Azyumardi, 2007. "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme
- Banks, J. 1989. "Multicultural Education: Characteristics and Goals", dalam J. Banks dan C. Banks (Ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. (Boston: Allyn dan Bacon).
- Dewantara, Ki Hajar. 1967. *Karja K.H. Dewantara, Bagian ke-II A: Kebudayaan*, (Jogjakarta: Taman Siswa).
- Freire, Paulo. 1991. *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. III. (Jakarta: LP3ES).
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. (Magelang: Indonesia Tera).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>

# PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://sejarah.upi.edu">sejarah.upi.edu</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.bruderfic.or.id">www.bruderfic.or.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	1%
5	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
7	<a href="http://sipeg.unj.ac.id">sipeg.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Miftahul Husni. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Prodi PGSD Universitas PGRI	1%

Palembang Sumatera Selatan)", AR-RIAYAH :  
Jurnal Pendidikan Dasar, 2019

Publication

---

9	Suci Rahayu. "Akulturasi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di SMA Negeri 1 Baturraden", Keraton: Journal of History Education and Culture, 2021 Publication	1 %
10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	qdoc.tips Internet Source	1 %
12	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
14	id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
16	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	disdikpora.solokkab.go.id Internet Source	<1 %

---

18

[menulisbersamaaswir.blogspot.com](http://menulisbersamaaswir.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

19

Rusdin Ahmad. "DEMOKRASI DAN MULTI KULTURALISME DALAM KONTESTASI DAKWAH ISLAM", Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2017

Publication

<1 %

20

[digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On